



LAPORAN KEUANGAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

(SEKRETARIAT KOTA)

Per 31 Desember 2024
Audited

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2024 (*Audited*). Laporan Keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.(CaLK).

Laporan Keuangan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun telah berupaya menyusun dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku, kami menerima masukan dan komentar konstruktif dari berbagai pihak agar Laporan Keuangan yang kami buat kedepan semakin baik.

Jakarta, 21 Mei 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



M Anwar

NIP. 196605281998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024 (<i>Audited</i>)	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	8
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	32
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	32
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	33
3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	34
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	49
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD.....	50
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	50
4.2 Neraca	58
4.3 Laporan Operasional	74
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas	80
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	82
5.1 Struktur Organisasi	82
5.2 Visi Dan Misi	86
5.3 Tugas dan Fungsi	87
5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis	90
5.5 Target Kinerja Strategis	91
5.6 Penghargaan yang Diterima	92
BAB VI PENUTUP	95
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran.....	7
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	8
Tabel 2.2. 1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis.....	10
Tabel 2.2. 2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	31
Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran.....	50
Tabel 4. 2 Rincian Belanja Daerah	52
Tabel 4. 3 Rincian Belanja Operasi.....	53
Tabel 4. 4 Rincian Belanja Modal	55
Tabel 4. 5 Neraca	58
Tabel 4. 6 Rincian Aset	60
Tabel 4. 7 Rincian Aset Lancar	61
Tabel 4. 8 Rincian Aset Tetap.....	64
Tabel 4. 9 Rincian Aset Lainnya	67
Tabel 4. 10 Rincian Utang Belanja.....	70
Tabel 4. 11 Laporan Operasional.....	74
Tabel 4. 12 Rincian Beban	76
Tabel 4. 13 Laporan Perubahan Ekuitas	80
Tabel 5. 1 Target Kinerja Strategis	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Realisasi Belanja Daerah.....	53
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan	85
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Beban Dibayar Dimuka	90
Lampiran 2 Rincian Persediaan.....	90
Lampiran 3 Rincian Aset Rusak Berat.....	90
Lampiran 4 Rincian Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA.....	90



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 21 Mei 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



M Anwar
NIP 196605281998031003



LAPORAN KEUANGAN

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
(SEKRETARIAT KOTA)**

Per 31 Desember 2024
Audited



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	4.1.2.1.a)	385.328.720.000,00	377.000.582.906,00	97,84	347.570.086.616,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.b)	45.272.761.315,00	44.229.181.928,00	97,69	32.421.537.610,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	4.1.2.1	430.601.481.315,00	421.229.764.834,00	97,82	379.991.624.226,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	4.1.2.2.a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.b)	9.967.039.370,00	9.850.607.780,00	98,83	3.327.153.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.c)	32.164.885.301,00	27.978.332.800,00	86,98	3.833.428.666,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.1.2.2.d)	0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.e)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.1.2.2.f)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	4.1.2.2	42.131.924.671,00	37.828.940.580,00	89,79	7.160.581.666,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	4.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	4.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		472.733.405.986,00	459.058.705.414,00	97,11	387.152.205.892,00
SURPLUS / (DEFISIT)	4.1.3	(472.733.405.986,00)	(459.058.705.414,00)		(387.152.205.892,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	4.1.4	0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	4.1.5	(472.733.405.986,00)	(459.058.705.414,00)		(387.152.205.892,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2025
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

M. Anwar
 NIP. 196605281998031003



NERACA



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.2.1.a).1	0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.2.1.a).2	30.457.650,00	0,00
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	4.2.1.a).2	30.457.650,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	4.2.1.a).3	62.293.749,00	72.651.728,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	4.2.1.a).3	62.293.749,00	72.651.728,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	4.2.1.a).4	753.907.921,00	490.823.162,00
Barang Pakai Habis	4.2.1.a).4	753.907.921,00	490.823.162,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	4.2.1.a)	846.659.320,00	563.474.890,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	4.2.1.b).1	320.743.778.050,00	320.743.778.050,00
Peralatan dan Mesin	4.2.1.b).2	54.630.488.767,00	48.970.669.073,00
Gedung dan Bangunan	4.2.1.b).3	650.530.787.395,00	647.614.006.566,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.b).4	636.262.967,00	636.262.967,00
Aset Tetap Lainnya	4.2.1.b).5	168.232.900,00	173.622.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.2.1.b).6	76.525.200,00	76.525.200,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.1.b).7	(641.059.123.932,00)	(625.909.833.361,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(45.944.239.001,00)	(45.640.342.107,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(594.688.252.445,00)	(579.874.671.916,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(405.787.486,00)	(373.974.338,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(20.845.000,00)	(20.845.000,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.2.1.b)	385.726.951.347,00	392.305.031.395,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.2.1.c).1	4.693.096.987,00	3.670.056.581,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.c).1.a)	4.343.241.704,00	3.320.201.298,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.2.1.c).1.b)	349.855.283,00	349.855.283,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	4.2.1.c).2	(4.298.791.090,00)	(3.277.118.204,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.c).2	(3.948.935.807,00)	(2.927.262.921,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.2.1.c).2	(349.855.283,00)	(349.855.283,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	4.2.1.c)	394.305.897,00	392.938.377,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET	4.2.1	386.967.916.564,00	393.261.444.662,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja	4.2.2	20.713.866.036,00	23.720.905.071,00
Utang Belanja Pegawai	4.2.2.1	19.500.810.064,00	22.878.280.751,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.2.2.2	1.213.055.972,00	842.624.320,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	4.2.2.2	1.213.055.972,00	842.624.320,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00



AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.2	20.713.866.036,00	23.720.905.071,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.2.2	20.713.866.036,00	23.720.905.071,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	4.2.3	(66.882.025.850,00)	(16.894.176.301,00)



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.2.3	433.136.076.378,00	386.434.715.892,00
RK PPKD Kas	4.2.3	459.058.705.414,00	387.152.205.892,00
RK PPKD Non Kas	4.2.3	(25.922.629.036,00)	(717.490.000,00)
JUMLAH EKUITAS	4.2.3	366.254.050.528,00	369.540.539.591,00
JUMLAH EKUITAS	4.2.3	366.254.050.528,00	369.540.539.591,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.2.3	386.967.916.564,00	393.261.444.662,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2025
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA

M. Anwar
NIP. 896605281998031003



LAPORAN OPERASIONAL



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50140000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.3.a	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI	4.3.b.1	417.869.549.049,00	380.527.410.459,00	37.342.138.590,00	9,81
Beban Pegawai	4.3.b.1.a	373.623.112.219,00	347.958.634.779,00	25.664.477.440,00	7,38
Beban Barang dan Jasa	4.3.b.1.b	44.246.436.830,00	32.568.775.680,00	11.677.661.150,00	35,86
Beban Barang	4.3.b.1.b.a)	4.152.049.418,00	2.751.852.691,00	1.400.196.727,00	50,88
Beban Jasa	4.3.b.1.b.b)	28.263.647.532,00	25.553.716.919,00	2.709.930.613,00	10,60
Beban Pemeliharaan	4.3.b.1.b.c)	11.830.739.880,00	4.263.206.070,00	7.567.533.810,00	177,51
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.b.2	18.553.016.392,00	13.441.471.738,00	5.111.544.654,00	38,03
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.3.b.1.b.a	2.345.016.020,00	1.078.517.307,00	1.266.498.713,00	117,43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.3.b.1.b.b	16.175.503.464,00	12.331.141.283,00	3.844.362.181,00	31,18
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.3.b.1.b.c	31.813.148,00	31.813.148,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.3.b.1.b.d	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.3.b.1.b.e	683.760,00	0,00	683.760,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.3.b.1.b.f	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	4.3.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan	4.3.b.4	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	4.3.b	436.422.565.441,00	393.968.882.197,00	42.453.683.244,00	10,78



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50140000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	4.3.b	(436.422.565.441,00)	(393.968.882.197,00)	(42.453.683.244,00)	10,78
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA	4.3.b.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	4.3.b.6	(436.422.565.441,00)	(393.968.882.197,00)	(42.453.683.244,00)	10,78

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2025
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

M. Anwar
NIP 196605281998031003



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2023 dan 2022	4.4	(16.894.176.301,00)	(117.220.030.249,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	4.4	386.434.715.892,00	495.066.023.532,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	4.4	0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2024	4.4	369.540.539.591,00	377.845.993.283,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022	4.4	386.434.715.892,00	495.088.993.777,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	4.4	(386.434.715.892,00)	(495.066.023.532,00)
RK PPKD per 1 Januari 2024	4.4	0,00	22.970.245,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	4.4	369.540.539.591,00	377.868.963.528,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO	4.4	(436.422.565.441,00)	(393.968.882.197,00)
Mutasi RK PPKD	4.4	433.136.076.378,00	386.411.745.647,00
Koreksi Ekuitas	4.4	0,00	(771.287.387,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas	4.4	(3.286.489.063,00)	(8.328.423.937,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO	4.4	(66.882.025.850,00)	(16.894.176.301,00)
RK PPKD	4.4	433.136.076.378,00	386.434.715.892,00
EKUITAS AKHIR	4.4	366.254.050.528,00	369.540.539.591,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyusun Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 (*Audited*) sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 (*Audited*) disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
- n. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);
- o. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;

- s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
- u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- w. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024;
- x. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) Tahun 2024 (*Audited*) dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

- BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 (*Audited*).

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp472.733.405.986,00 dan Realisasi pencapaian sebesar Rp459.058.705.414,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	472.733.405.986,00	459.058.705.414,00	97,11
BELANJA OPERASI	430.601.481.315,00	421.229.764.834,00	97,82
Belanja Pegawai	385.328.720.000,00	377.000.582.906,00	97,84
Belanja Barang dan Jasa	45.272.761.315,00	44.229.181.928,00	97,69
BELANJA MODAL	42.131.924.671,00	37.828.940.580,00	89,79
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.967.039.370,00	9.850.607.780,00	98,83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.164.885.301,00	27.978.332.800,00	86,98
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(472.733.405.986,00)	(459.058.705.414,00)	(97,11)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(472.733.405.986,00)	(459.058.705.414,00)	(97,11)

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp459.058.705.414,00 atau 97,11% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp472.733.405.986,00. Dengan demikian Jumlah Anggaran yang belum terealisasi adalah sebesar Rp13.674.700.572,00 atau 2,89%.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp421.229.764.834,00 atau 97,82% dari total Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp430.601.481.315,00 dan Belanja Modal sebesar Rp37.828.940.580,00 atau 89,79% dari total Anggaran Belanja Modal sebesar Rp42.131.924.671,00.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Berdasarkan data yang tercantum pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, Target jangka menengah Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2023-2026 (Renstra). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan sebagai kategori Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024. Secara realisasi Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) Tahun 2024 telah melebihi target sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Layanan Kota	Nilai	92,44	95,61	103%	e-SAKIP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
	Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Administrasi Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	92,44	95,61	103%	e-SAKIP
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	93,74	96,80	103%	e-SAKIP
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	91,145	94,42	104%	e-SAKIP

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa secara umum sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah ditargetkan dapat dicapai beserta analisa faktor pendorong, faktor penghambat

dan solusi program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2. 1 Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	93,74	96,80	103%	Faktor Pendorong: 1. Hasil kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraa n pelayanan kegiatan kemasyarakatan serta dapat dijadikan bahan perbaikan/penin gkatan kualitas pelayanan yang lebih prima 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara periodik dengan jangka waktu ditentukan dan disampaikan kepada seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik 3. Tingginya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 86 menjadi 91,145. - Selama 2024, hasil survey Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melebihi target sebagai berikut: - Semester 1 : 95,48 - Semester 2 : 93,35 - Capaian tahun 2024 merupakan agregat dari

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						menilai kinerja penyelenggara pelayanan Faktor Penghambat: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.	Semester 1 dan Semester 2, yaitu : 94,42 , telah melebihi target 91,145 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait percepatan hasil survey IEK
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	93,74	96,80	103%	Faktor Pendorong: - Pengisian survey dilaksanakan	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				tepat waktu oleh Para Kepala UKPD selaku responden - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala sehingga dapat target hasil survei IEK dapat tercapai melebihi target. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja pada tahun 2024 dibandingkan target pada tahun 2023 - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang dilakukan menjelang akhir November 2024 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 86 menjadi 91,145. - Selama 2024, hasil survey Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melebihi target sebagai berikut: - Semester 1 : 95,48 - Semester 2 : 93,35 - Capaian tahun 2024 merupakan agregat dari Semester 1 dan Semester 2, yaitu : 94,42 , telah melebihi target 91,145 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
							tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait percepatan hasil survey IEK
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	93,74	96,80	103%	Faktor Pendorong: 1. Hasil kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan kemasyarakatan serta dapat dijadikan bahan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara periodik dengan jangka waktu ditentukan dan disampaikan	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 88,6 menjadi 93,74 - Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						kepada seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik 3. Tingginya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan Faktor Penghambat: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survei kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, sebagai berikut: 1. Semester I sebesar 96,21 2. Semester II sebesar 97,39 Solusi Permasalahan : Telah dilaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan SKM dengan Kecamatan dan Kelurahan, terhadap layanan yang memperoleh IKM terendah dilakukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan/ peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.	
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	91,145	94,42	104%	Faktor Pendorong: - Pengisian survey dilaksanakan tepat waktu oleh Para Kepala UKPD selaku responden - Kerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat Walikota dan UKPD telah dilaksanakan secara berkala sehingga dapat target hasil survei IEK dapat tercapai melebihi target. Faktor Penghambat: - Terjadi kenaikan target kinerja pada tahun 2024 dibandingkan target pada tahun 2023 - Survey Indeks Efektivitas Koordinasi yang	Keterangan: - Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka target Indikator Kinerja Utama Walikota Jakarta Selatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 86 menjadi 91,145. - Selama 2024, hasil survey Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melebihi target sebagai berikut: - Semester 1 : 95,48 - Semester 2 : 93,35 - Capaian tahun 2024 merupakan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						dilakukan menjelang akhir November 2024 sehingga hasil survey keluar menjelang batas waktu pelaporan kinerja	agregat dari Semester 1 dan Semester 2, yaitu : 94,42 , telah melebihi target 91,145 Solusi Permasalahan : - Menyampaikan hasil evaluasi survey kepada para Asisten tingkat Kota dan Bagian Setko sehingga dapat melakukan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Para UKPD - Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait percepatan hasil survey IEK
Sasaran Khusus							
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah	100	100	100%	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam melakukan pemantauan terhadap capaian kegiatan kegiatan Strakom 2.	Keterangan: Rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah telah terimplementasi sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Berkoordinasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
		dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program				Terdapat sesi Problem Solving dari Dinas Kominfo DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan pengolahan data capaian Strategi Komunikasi Publik Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan SKPD terkait membutuhkan waktu dalam proses publikasi kegiatan di media sosial 2. Petugas akun admin media sosial SKPD kurang menguasai/ memahami penerbitan kegiatan di wilayah	dengan SKPD lokus strategis komunikasi untuk diingatkan secara berkala dalam hal publikasi kegiatan strategis komunikasi 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta dalam tahapan update data kegiatan
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123%	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam melakukan pemantauan	Keterangan: Tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas telah terwujud sesuai target. Solusi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						terhadap capaian kegiatan SDI 2. Terdapat sesi Problem Solving dari Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah data capaian SDI atau masalah teknis dalam sistem SDI Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait membutuhkan waktu dalam proses pengolahan data	Permasalahan : 1. Berkoordinasi dengan bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait data yang akan di input 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam tahapan pengolahan data SDI
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	96,87	105%	Faktor Pendorong: 1. Tingginya tingkat partisipasi responden dalam mengikuti Survey Kepuasan Layanan	Keterangan: Hasil Nilai SKLM Triwulan I : 95,86 Hasil Nilai SKLM Triwulan II : 97,16 Hasil Nilai SKLM Triwulan III : 97,88 Hasil Nilai SKLM Triwulan IV : 96,37 Solusi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						Masyarakat dan memberikan nilai baik Faktor Penghambat: 1. Terdapat responden yang tidak dapat mengikuti survey karena akun JAKI yang tidak dapat digunakan	Permasalahan : 1. Berkoordinasi dengan mengingatkan responden untuk mengikuti survei kepuasan layanan masyarakat 2. Berkoordinasi dengan pihak Jakarta Smart City dalam tahapan update data responden agar dapat ikut serta dalam kegiatan survei kepuasan layanan masyarakat
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	100%	Faktor Pendorong: Tersedianya data dalam kartu inventaris barang yang dapat dilihat dalam Aplikasi Aset Jakarta Faktor Penghambat: 1. Keterbatasan SDM untuk melakukan inventarisasi aset, terutama aset KIB B peralatan dan mesin di Kantor Walikota Kota	Keterangan: Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel telah dikelola sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Optimalisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi BMD 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terutama terkait kekuatan signal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						Administrasi Jakarta Selatan 2. Adanya hambatan teknis signal dan sistem aset down pada saat dilakukan inventarisasi data	
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	96,85	121%	Faktor Pendorong: 1. Tersedianya aplikasi penunjang dalam monitoring capaian P3DN 2. Terdapat sesi Problem Solving dari Tim P3DN untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan dan penyajian data capaian P3DN Faktor Penghambat: 1. Kurangnya Bimbingan teknis terkait tata cara pengisian/penginputan data capaian P3DN kepada SKPD dan UKPD 2. Masih ada	Keterangan: Penggunaan produk dalam negeri telah ditingkatkan sesuai target Solusi Permasalahan : 1. Perlu dilaksanakan kegiatan Bimtek administrasi untuk meningkatkan capaian P3DN 2. Jumlah PIC untuk Problem Solving P3DN perlu ditingkatkan 3. Pencatatan data secara manual dalam Belanja P3DN (seperti pencatatan kategori Swakelola) perlu ditingkatkan menjadi tidak manual atau lebih sistematis 4.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						keharusan pencatatan manual pada LPSE untuk pelaksanaan belanja PDN yang mengakibatkan data tidak sesuai dengan realisasi 3. Banyaknya kendala pencatatan ganda terhadap kegiatan swakelola UKPD yang mungkin terjadi karena kurangnya Bimtek kepada UKPD 4. Masih terdapat barang-barang import yang belum dapat tergantikan dengan Produk Dalam Negeri terutama barang eksisting 5. Respon/tanggapan Problem Solving terkait data capaian P3DN dan permasalahan lainnya perlu ditingkatkan 6.	Pembaharuan data P3DN disesuaikan dengan APBD-P

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						Kemungkinan ketidaksesuaian data capaian P3DN karena adanya APBD-P	
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	100%	Faktor Pendorong: Tercapainya pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 40 JP per tahun seluruh pegawai ASN melalui metode pembelajaran seperti: Podcast Rabu Belajar, Sijule, Diklat yang diadakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Webinar/workshop atau seminar yang diselenggarakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta maupun instansi lain yang diikuti pegawai ASN dalam pengembangan Kompetensi Faktor Penghambat: 1. Terdapat ketidaksesuaian	Keterangan: Realisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 40 JP pertahun sesuai dengan target dan diselesaikan secara tepat waktu Solusi Permasalahan : Koordinasi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk membantu sinkronisasi data pegawai dan data capaian JP pegawai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						capaian JP Pegawai ASN antara data pada Simdiklat dengan data pada sistem Si Pintar, 2. Sebagian data terkait pengembangan kompetensi belum terupdate dalam sistem khususnya terjadi pada data pegawai yang telah mengikuti PKA dan PKP	
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%	Faktor Pendorong: Aset Manajemen Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap Pegawai maupun SKPD/UKPD dapat mendorong organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk	Keterangan: Tercapainya realisasi Aset Manajemen Pengetahuan pegawai yang telah terdigitilisasi dalam bentuk Video sesuai target pada TW III dan TW IV, dan pada TW IV sudah diupload/diunggah pada sistem https://km-bpsdm.jakarta.go.id/home dalam bentuk video sesuai dengan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik. Faktor Penghambat: Aset Manajemen Pengetahuan yang dimiliki pegawai belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan baik dalam bentuk manajemen pengetahuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017	ketentuan Solusi Permasalahan : Koordinasi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta terkait aset manajemen pengetahuan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pergub dan terkait dengan sistem baru KMS (Knowlegde Management System)
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%	Faktor Pendorong: 1. Partisipasi aktif dari semua bagian dalam pengimplementasian Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Adanya pendampingan dari Inspektorat sebagai PD	Keterangan: Penerapan Manajemen Risiko telah diimplementasikan sesuai target Solusi Permasalahan : Melakukan pendampingan pada bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						Pengampu pengimplementasian Manajemen Risiko pada PD Faktor Penghambat: Belum maksimalnya bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan pemantauan risiko triwulan dan tahunan	dalam melakukan pemantauan risiko triwulan maupun tahunan
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	90,03	127%	Faktor Pendorong: 1. Seluruh pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan input capaian kinerja pada sistem e-monev dengan baik, sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100 % 2. Telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi realisasi anggaran dan input capaian fisik setiap	Keterangan: Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi telah tercapai Solusi Permasalahan : Melakukan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						triwulan pada sistem e- Monev Faktor Penghambat: 1. Adanya kesalahan input Kode Rekening dan Komponen yang berakibat anggaran tidak dapat direalisasikan 2. Pengurangan Anggaran yang berdampak pada penyesuaian capaian kinerja pada Perubahan APBD TA 2024, sehingga beberapa Capaian Kinerja Sub Kegiatan tidak tercapai	
Sasaran Operasional							
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%	Faktor Pendorong: 1. Keputusan Rapim/ Arahan Gubernur kepada Walikota disampaikan melalui pada rapat pimpinan di tingkat Provinsi dan melalui website e-TPP 2.	Keterangan: Realisasi sesuai target, Jumlah TL Rapim Arahan Gubernur yang diterima pada Tahun 2024, yaitu: 1. Terdapat 4 (empat) arahan Gubernur yang diterima, dengan rincian : - dua arahan telah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						Koordinasi aktif dari unit kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan baik pada tingkat Suku Dinas/ Badan, Bagian Setko, Kecamatan dan Kelurahan Faktor Penghambat: NIHIL	ditandatangan di tahun 2024 - dUa arahan akan ditindaklanjuti di tahun 2025 sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Terdapat sejumlah 13 Disposisi/informasi arahan Gubernur yang disampaikan dan memerlukan tindak lanjut oleh Dinas/Badan terkait. Solusi Permasalahan : NIHIL
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100%	Faktor Pendorong: 1. Penyelenggaraan dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta	Keterangan: Realisasi sesuai target, pengaduan yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 8.898 laporan/aduan seluruhnya telah ditindaklanjuti namun terdapat 20 aduan yang melebihi batas waktu penyelesaian sesuai dengan SE Sekda Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengaduan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						petugas yang memiliki kemampuan/ kompeten dalam menangani pengaduan masyarakat atas keluhan/aduan yang disampaikan masyarakat. Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dengan UKPD terkait membutuhkan waktu dalam proses penanganan aduan masyarakat 2. Pemantauan secara rutin dalam Penggunaan aplikasi CRM dan dalam menindaklanjuti aduan yang diterima perlu mendeskripsikan upaya/hasil tindak lanjut secara jelas untuk disampaikan kepada masyarakat. 3. Petugas perlu	Masyarakat melalui Aplikasi CRM Solusi Permasalahan : Koordinasi, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan melakukan pembinaan terkait kebijakan dan pedoman tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi CRM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						meningkatkan penguasaan/ pemahaman penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi CRM.	
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%	Faktor Pendorong: Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihak terkait atas temuan pemeriksaan BPK RI sehingga terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) menghasilkan output berupa Berita Acara (BA) tersaji setiap triwulan Faktor Penghambat: 1. Adanya rekomendasi temuan yang melibatkan banyak pihak 2. Memerlukan waktu yang	Keterangan: Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah diselesaikan sesuai target Solusi Permasalahan: 1. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak yang terkait atas rekomendasi temuan BPK RI 2. Melakukan pembahasan berupa konsinyering/four partied atas temuan secara intensif dengan SKPD terkait, Inspektorat Provinsi dan BPK RI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi Permasalahan
						panjang dalam menyelesaikan rekomendasi temuan tersebut karena harus sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan 3. Adanya SKPD yang memiliki rekomendasi temuan BPK RI yang sama belum menyelesaikan temuan tersebut sehingga mempengaruhi capaian status selesai temuan SKPD lain	

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan ditunjang oleh pelaksanaan lima program di bawah ini. Sebagai informasi, Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi merupakan agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektifitas Koordinasi, sehingga lima program ini melekat pada kedua indeks tersebut. Di bawah ini disajikan atas pelaksanaan lima program tahun 2024 meliputi realiasi fisik dan keuangan:

**Tabel 2.2. 2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan
Tahun 2024**

No.	Program	Fisik			Keuangan			
		Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
A	B	C	D	E=D/C	F	G	H	I=H/G
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	3.124.410.619	3.124.410.619	2.975.588.506	95,24%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100%	114.365.498.627	114.365.498.627	110.979.419.799	97,04%
3	Program Pengelolaan Kecamatan	100%	100%	100%	556.516.625.544	556.516.625.544	548.888.588.847	98,63%
4	Program Pengelolaan Kota Administrasi	100%	99%	99%	3.139.067.393	3.139.067.393	3.010.532.693	95,91%
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	532.648.039.905	532.648.039.905	513.537.555.005	96,41%
Jumlah		100%	99,89%	99,89%	1.209.793.642.088	1.209.793.642.088	1.179.391.684.850	97,49%

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

Secara operasional tahapan pekerjaan dibagi menjadi tiga tahapan: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pelaporan. Ketiga tahapan ini merupakan capaian fisik pekerjaan yang kemudian disandingkan dengan capaian anggaran yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas maka diperoleh data rata-rata per program secara realisasi fisik/pelaksanaan kegiatan mencapai 100% kecuali Program Pengelolaan Kota Administrasi sebesar 99% dan realisasi keuangan mencapai 97,49%.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara teknis dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian/gabungan pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi/gabungan agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

LKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) merupakan entitas akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan LKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2024 (*Audited*). Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Demikian halnya dengan pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan baik transaksi maupun kejadian adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka disajikan laporan berbasis kas. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan dalam

penyusunan dan penyajian LKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah:

1. Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
2. Penyajian pos-pos necara berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

a) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

c) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

d) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat atau potensi jasa.
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Timbulnya kewajiban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

e) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

f) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 3) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 4) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

- 5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 7) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
- 8) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 9) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

c. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah
- b) Peralatan dan mesin, yang diantaranya terdiri dari :
 - i. alat-alat besar
 - ii. alat-alat angkutan
 - iii. alat-alat bengkel dan alat ukur
 - iv. alat-alat pertanian/peternakan
 - v. alat-alat kantor dan rumah tangga
 - vi. alat studio dan alat komunikasi
 - vii. alat-alat kedokteran
 - viii. alat-alat laboratorium
 - ix. alat keamanan
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, irigasi dan jaringan
 - i. jalan dan jembatan
 - ii. bangunan air/irigasi
 - iii. instalasi
 - iv. jaringan
- e) Aset tetap lainnya
 - i. buku dan perpustakaan
 - ii. barang bercorak kesenian/kebudayaan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan
- 1) Penilaian Aset Tetap

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Sensus Barang sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sensus Barang Daerah dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1086/2008 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Tahun 2008. Sensus Barang Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tertib inventarisasi dan pencatatan semua barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi terkini mengenai barang/aset dimaksud. Selain itu, diharapkan dapat diperoleh nilai aset tetap di setiap SKPD per 30 Juni 2007 guna penyusunan Neraca Awal SKPD.

Adapun tata cara penilaian barang hasil sensus berdasarkan Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor 4248/-077.21 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008, sehingga aset tetap yang dicatat dalam penyusunan neraca per 30 Juni 2007 setelah koreksi dicatat berdasarkan sensus barang, dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Tanah

Menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

(1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun 2007 atas tanah tersebut atau tanah disekitarnya.

(2) Pengadaan tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

b) Bangunan/Jalan/Saluran

Menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

(1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan perkiraan sesuai harga bangunan aset Pemda yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Kantor Tata Bangunan Gedung Pemerintah Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.

(2) Pengadaan sesudah tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

c) Kendaraan

Menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

- (1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan tahun 2007 sesuai Peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2007.
- (2) Pengadaan sesudah tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

d) Barang Lainnya

Jenis barang lainnya yang tidak termasuk kriteria ketiga jenis barang tersebut di atas, nilai yang dicantumkan menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

- (1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan harga barang tersebut yang tercatat pada data awal, atau jika tidak diketemukan pada data awal penilaian dilakukan berdasarkan taksiran dengan membandingkan data harga barang sejenis.
- (2) Pengadaan tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

e) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan adalah apabila penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Dengan adanya sensus barang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008, berpengaruh pada nilai penyajian akun aset tetap yang bertambah besar.

Sedangkan penyusunan Neraca, penambahan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- (3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- (4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- (5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- (7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau

membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi aset tetap berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap), jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	300.000
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

1) Penyusutan Aset

Adapun dalam penilaian aset tetap adanya penyusutan yang merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan. Penyusutan aset tetap pertama kali dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman. Adapun perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Penyusutan Per Tahun = $1 / \text{Masa Manfaat} \times \text{Nilai yang dapat disusutkan}$.

MASA MANFAAT

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	TANAH	Tidak Disusutkan
2	PERALATAN DAN MESIN	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Pertenakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	ASET TETAP LAINNYA;	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan (Tanaman Hias)	Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap – Renovasi	Masa kerjasama / masa umur ekonomis, yang lebih pendek
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Tidak Disusutkan

*)Berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019.

2) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai extra komtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lainnya.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 3) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh

bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- 4) Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- 5) Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- 6) Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti Aset Air Mancur & Lansekap P. Diponegoro, Patung Panglima Sudirman, Air Mancur Tugu Selamat Datang, titipan uang sewa rumah ber-SIP, titipan uang santunan pengosongan rumah (sengketa), aset tetap rusak berat.
- 7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melakukan penyusutan atas aset tetap, karena sedang dilaksanakan proses reinventarisasi dan appraisal aset tetap serta aset tanah masih dalam proses sertifikat tanah.

g) Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

- 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a) Kewajiban Jangka Pendek;
 - (1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (2) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang
 - (1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (2) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.
 - (3) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga dari luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 5) Pengukuran Kewajiban
 - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan

nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

- b) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- c) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

h) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

i) Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada

setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengacu pada kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrua, dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan ada “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	385.328.720.000,00	377.000.582.906,00	97,84	347.570.086.616,00
Belanja Pegawai	45.272.761.315,00	44.229.181.928,00	97,69	32.421.537.610,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	430.601.481.315,00	421.229.764.834,00	97,82	379.991.624.226,00
JUMLAH BELANJA OPERASI				
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah	9.967.039.370,00	9.850.607.780,00	98,83	3.327.153.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.164.885.301,00	27.978.332.800,00	86,98	3.833.428.666,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	42.131.924.671,00	37.828.940.580,00	89,79	7.160.581.666,00
JUMLAH BELANJA MODAL				
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA				
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER				
JUMLAH BELANJA DAERAH	472.733.405.986,00	459.058.705.414,00	97,11	387.152.205.892,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(472.733.405.986,00)	(459.058.705.414,00)		(387.152.205.892,00)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana	0,00	0,00	0,00	0,00

Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah				
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(472.733.405.986,00)	(459.058.705.414,00)		(387.152.205.892,00)

4.1.1 Pendapatan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Pendapatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

4.1.2 Belanja

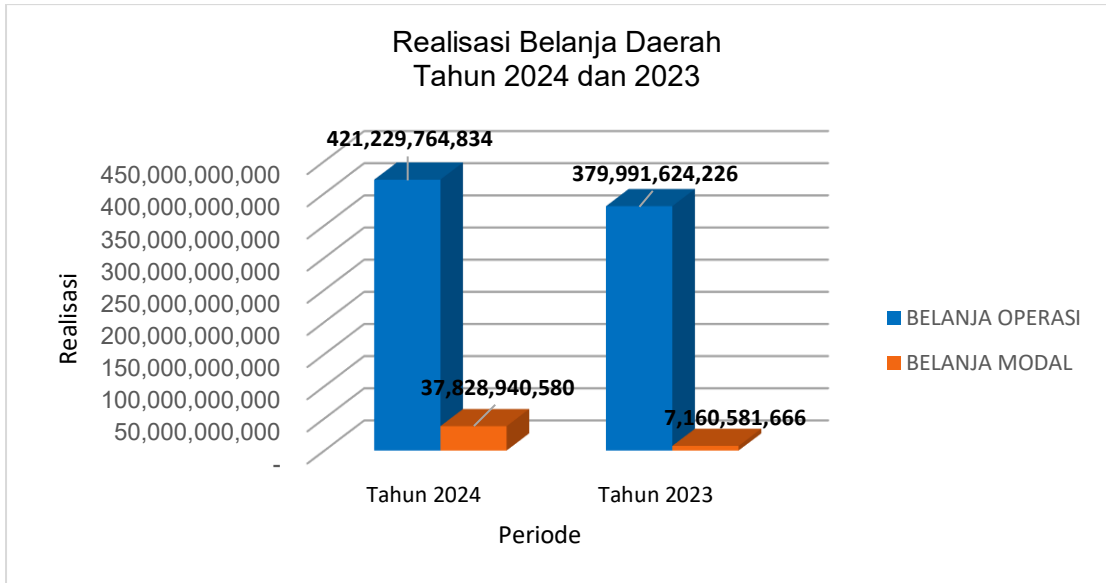
Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka untuk tahun 2024 pos Belanja Daerah yang dialokasikan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp472.733.405.986,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp459.058.705.414,00 atau 97,11%. Sedangkan realisasi tahun 2023 (*Audited*) adalah Rp387.152.205.892,00. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Rincian Belanja Daerah
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Daerah	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Belanja Operasi	430.601.481.315,00	421.229.764.834,00	97,82	379.991.624.226,00
2	Belanja Modal	42.131.924.671,00	37.828.940.580,00	89,79	7.160.581.666,00
Jumlah		472.733.405.986,00	459.058.705.414,00	97,11	387.152.205.892,00

**Grafik 4. 1 Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2024 dan 2023**



1. Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi di Sekretariat Kota tahun 2024 adalah sebesar Rp430.601.481.315,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp421.229.764.834,00 atau sebesar 97,82% dari saldo anggaran. Sedangkan realisasi tahun 2023 adalah Rp379.991.624.226,00. Adapun rincian belanja operasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 3 Rincian Belanja Operasi
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Operasi	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Belanja Pegawai	385.328.720.000,00	377.000.582.906,00	97,84	347.570.086.616,00
2	Belanja Barang dan Jasa	45.272.761.315,00	44.229.181.928,00	97,69	32.421.537.610,00
Jumlah		430.601.481.315,00	421.229.764.834,00	97,82	379.991.624.226,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja Operasi terdiri atas alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Adapun

realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp377.000.582.906,00 atau sebesar 97,84% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp385.328.720.000,00. Sedangkan realisasi tahun 2023 adalah Rp347.570.086.616,00. Alokasi anggaran belanja pegawai ini dikelola oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bahwa terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp212.500,00 sesuai dengan STS Nomor 327/STS/UD.02.05 tanggal 1 Juli 2024 an Juju Firdayanti sudah dikembalikan oleh pegawai yang bersangkutan namun tidak melalui rekening bendahara Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan (Langsung ke rekening BUD), sehingga menyebabkan selisih pembukuan pada BKU Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota). Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp44.229.181.928,00 atau sebesar 97,69% dari anggaran sebesar Rp45.272.761.315,00. Sedangkan realisasi tahun 2023 (*Audited*) adalah Rp32.421.537.610,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal di Sekretariat Kota adalah sebesar Rp37.828.940.580,00 dan telah direalisasikan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp42.131.924.671,00 atau 89,79% dari anggaran. Sedangkan tahun 2023 (*Audited*) adalah Rp7.160.581.666,00. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 4 Rincian Belanja Modal
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Modal	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.967.039.370,00	9.850.607.780,00	98,83	3.327.153.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.164.885.301,00	27.978.332.800,00	86,98	3.833.428.666,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		42.131.924.671,00	37.828.940.580,00	89,79	7.160.581.666,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja Modal terdiri atas alokasi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Adapun realisasi belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 direalisasikan melalui pembelian belanja modal peralatan dan mesin pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Realisasi Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp.9.850.607.780,00 atau sebesar 98,83% dari anggaran sebesar Rp9.967.039.370,00. Sedangkan realisasi tahun 2023 adalah Rp3.327.153.000,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) direalisasikan melalui pembelian belanja modal gedung dan bangunan pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Realisasi Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp27.978.332.800,00 atau sebesar 86,98% dari anggaran sebesar Rp32.164.885.301,00. Sedangkan realisasi tahun 2023 (*Audited*) adalah Rp3.833.428.666,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tidak ada alokasi anggaran dan realisasi atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada alokasi anggaran dan realisasi atas Belanja Modal aset tetap lainnya untuk periode periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Tidak ada alokasi anggaran dan realisasi atas Belanja Modal Aset Lainnya untuk periode periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

3. Belanja Tidak Terduga

Tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

4. Belanja Transfer

Tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi Belanja Transfer pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

4.1.3 Surplus/Defisit

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*), Laporan Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) mengalami defisit anggaran sebesar jumlah Belanja, karena tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Daerah. Defisit untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp459.058.705.414,00) yakni sebesar realisasi belanjanya. Sedangkan defisit untuk tahun 2023 (*Audited*) adalah (Rp387.152.205.892,00).

4.1.4 Pembiayaan

Tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi Pembiayaan, baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

Silpa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar (Rp459.058.705.414,00) yakni sebesar realisasi belanjanya. Sedangkan Silpa untuk tahun 2023 (*Audited*) adalah (Rp387.152.205.892,00).

4.2 Neraca

Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Berikut Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan):

Tabel 4. 5 Neraca
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)			
Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00	0,00
PPH 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00	0,00
PPH 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00	0,00
PPH 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.457.650,00	0,00	30.457.650,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	30.457.650,00	0,00	30.457.650,00
Beban Dibayar dimuka	62.293.749,00	72.651.728,00	(10.357.979,00)
Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	62.293.749,00	72.651.728,00	(10.357.979,00)
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	753.907.921,00	490.823.162,00	263.084.759,00
Barang Pakai Habis	753.907.921,00	490.823.162,00	263.084.759,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	846.659.320,00	563.474.890,00	283.184.430,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	320.743.778.050,00	320.743.778.050,00	0,00
Peralatan dan Mesin	54.630.488.767,00	48.970.669.073,00	5.659.819.694,00
Gedung dan Bangunan	650.530.787.395,00	647.614.006.566,00	2.916.780.829,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	636.262.967,00	636.262.967,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	168.232.900,00	173.622.900,00	(5.390.000,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.525.200,00	76.525.200,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
Akumulasi Penyusutan	(641.059.123.932,00)	(625.909.833.361,00)	(15.149.290.571,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(45.944.239.001,00)	(45.640.342.107,00)	(303.896.894,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(594.688.252.445,00)	(579.874.671.916,00)	(14.813.580.529,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(405.787.486,00)	(373.974.338,00)	(31.813.148,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20.845.000,00)	(20.845.000,00)	(0,00)
JUMLAH ASET TETAP	385.726.951.347,00	392.305.031.395,00	6.578.080.048,00
DANA CADANGAN			
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.693.096.987,00	3.670.056.581,00	1.023.040.406,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.343.241.704,00	3.320.201.298,00	1.023.040.406,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	349.855.283,00	349.855.283,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(4.298.791.090,00)	(3.277.118.204,00)	(1.021.672.886,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(3.948.935.807,00)	(2.927.262.921,00)	(1.021.672.886,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(349.855.283,00)	(349.855.283,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	394.305.897,00	392.938.377,00	1.367.520,00
JUMLAH ASET	386.967.916.564,00	393.261.444.662,00	(6.293.528.098,00)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	20.713.866.036,00	23.720.905.071,00	(3.007.039.035,00)
Utang Belanja Pegawai	19.500.810.064,00	22.878.280.751,00	(3.377.470.687,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.213.055.972,00	842.624.320,00	370.431.652,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	1.213.055.972,00	842.624.320,00	370.431.652,00
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Jaminan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.713.866.036,00	23.720.905.071,00	(3.007.039.035,00)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	20.713.866.036,00	23.720.905.071,00	(3.077.039.035,00)
EKUITAS			
Ekuitas	(66.882.025.850,00)	(16.894.176.301,00)	(49.987.849.549,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	433.136.076.378,00	386.434.715.892,00	46.701.360.486,00
RK PPKD Kas	459.058.705.414,00	387.152.205.892,00	71.906.499.522,00
RK PPKD Non Kas	(25.922.629.036,00)	(717.490.000,00)	(25.205.139.036,00)
JUMLAH EKUITAS	366.254.050.528,00	369.540.539.591,00	3.286.489.063,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	386.967.916.564,00	393.261.444.662,00	6.293.528.098,00

4.2.1 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan per 31 Desember 2023 (*Audited*). Aset tersebut terbagi dalam, aset tetap dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4. 6 Rincian Aset
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Jumlah	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5:4)
1	Aset Lancar	846.659.320,00	563.474.890,00	283.184.430,00	50,26
2	Aset Tetap	385.726.951.347,00	392.305.031.395,00	6.578.080.048,00	(1,68)
3	Aset Lainnya	394.305.897,00	392.938.377,00	1.367.520,00	0,35

Jumlah	386.967.916.564,00	393.261.444.662,00	6.293.528.098,00	(1,60)
--------	--------------------	--------------------	------------------	--------

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa total aset pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp386.967.916.564,00 atau (1,60%) mengalami penurunan sebesar (Rp6.293.528.098,00) jika dibandingkan total aset per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp393.261.444.662,00.

Berikut komposisi Aset pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan per 31 Desember 2023 (*Audited*).

a) Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang terdapat pada Neraca Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) terdiri dari:

**Tabel 4. 7 Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lancar	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Jumlah	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5:4)
1	Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.457.650,00	0,00	30.457.650,00	100,00
3	Beban Dibayar Dimuka	62.293.749,00	72.651.728,00	(10.357.979,00)	(14,26)
4	Persediaan	753.907.921,00	490.823.162,00	263.084.759,00	53,60
Jumlah		846.659.320,00	563.474.890,00	283.184.430,00	50,26

Berdasarkan tabel rincian Aset Lancar di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan pada posisi Aset Lancar. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp846.659.320,00 atau naik sebesar

Rp283.184.430,00 atau 50,26% dari posisi aset lancar per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp563.474.890,00. Rincian Aset lancar ini terdiri dari :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas di Bank) pada Neraca Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Terdapat saldo Piutang Neraca pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp30.457.650,00 merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja (Tindak Lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 231/LKPD 2024/Tim-06/04/2025 tanggal 15 April 2024) adalah sebagai berikut:

- a) Pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebesar Rp11.644.100,00 (STS Nomor 3240297717 tanggal 21 April 2025).
- b) Pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Kwartarab Pramuka Tahun 2024 sebesar Rp18.813.550,00 (STS Nomor 3240297725 tanggal 22 April 2025).

Jumlah saldo piutang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.457.650,00 atau 100% jika dibandingkan total per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00.

3. Beban Dibayar Dimuka

Terdapat Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp62.293.749,00 berupa Beban Barang Dibayar Dimuka yang merupakan saldo akhir BBM pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jumlah tersebut berarti mengalami penurunan sebesar (Rp10.357.979,00) atau (14,26%) jika dibandingkan total per 31 Desember 2023 (*Audited*)

sebesar Rp72.651.728,00. Nilai Beban Bayar Dimuka pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada lampiran 1.

4. **Persediaan**

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) dalam waktu 1 (satu) tahun.

Saldo persediaan ini merupakan hasil pengecekan fisik persediaan barang (*Stock Opname*) yang dilakukan oleh Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname dengan saldo akhir berdasarkan perhitungan secara metode FIFO dari e-persediaan per tanggal 31 Desember 2024. Adapun sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*), saldo Persediaan pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp753.907.921,00 mengalami kenaikan sejumlah Rp263.084.759,00 atau 53,60% dari saldo persediaan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp490.823.162,00. Nilai persediaan ini terdiri dari persediaan Bahan Pakai Habis dapat dilihat pada lampiran 2.

b) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp385.726.951.347,00 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami penurunan sebesar (Rp6.578.080.048,00) atau (1,68%) dari nilai aset tetap per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp392.305.031.395,00.

Berikut ini merupakan rincian aset tetap dan rincian mutasi aset tetap pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024:

**Tabel 4. 8 Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Jumlah	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5:4)
1	Tanah	320.743.778.050,00	320.743.778.050,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan mesin	54.630.488.767,00	48.970.669.073,00	5.659.819.694,00	11,56
3	Gedung dan Bangunan	650.530.787.395,00	647.614.006.566,00	2.916.780.829,00	0,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	636.262.967,00	636.262.967,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	168.232.900,00	173.622.900,00	(5.390.000,00)	(3,10)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.525.200,00	76.525.200,00	0,00	0,00
Total Aset tetap		1.026.786.075.279,00	1.018.214.864.756,00	8.571.210.523,00	0,84
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(45.944.239.001,00)	(45.640.342.107,00)	(303.896.894,00)	(0,67)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	(594.688.252.445,00)	(579.874.671.916,00)	(14.813.580.529,00)	(2,55)
9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	(405.787.486,00)	(373.974.338,00)	(31.813.148,00)	(8,51)
10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20.845.000,00)	(20.845.000,00)	0,00	0,00
Total Akum.Peny.Aset Tetap		(641.059.123.932,00)	(625.909.833.361,00)	(15.149.290.571,00)	(2,42)
Jumlah		385.726.951.347,00	392.305.031.395,00	(6.578.080.048,00)	(1,68)

1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp320.743.778.050,00 merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp320.743.778.050,00. Rincian tanah sebesar Rp320.743.778.050,00 sebagai berikut:

- 1) Tanah Rudin Walikota JS seluas 1.280 M² : Rp6.596.460.000,00
- 2) Tanah Gedung Pramuka seluas 1.380M² : Rp7.207.740.000,00
- 3) Tanah Makam Budha seluas 4.830M² : Rp4.486.104.000,00
- 4) Tanah Makam Budha seluas 1.007M² : Rp1.155.029.000,00
- 5) Tanah Makam Budha seluas 2.280M² : Rp5.874.546.200,00

- 6) Tanah Kantor Walikota JS seluas 35.194M² : Rp178.197.625.000,00
 7) Tanah RSUD seluas 28.776M² : Rp28.050.383.800,00
 8) Tanah Kantor Kecamatan Mampang Prapatan
 seluas 30.034M² : Rp89.175.890.050,00

Rincian aset tetap tanah tersebut tercatat dalam KIB A (Tanah).

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp54.630.488.767,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.659.819.694,00 dari Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp48.970.669.073,00.

Kenaikan sebesar Rp5.659.819.694,00 terdiri dari:

Penambahan : Rp9.971.009.500,00

- Belanja Modal TA 2024 : Rp9.850.607.780,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap : Rp42.200.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis : Rp78.201.720,00

Pengurangan : Rp4.311.189.806,00

- Transfer Keluar ke SKPD Lain : Rp3.285.330.000,00
- Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat : Rp1.023.040.406,00
- Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai- Selain Belanja Modal Tahun 2024 : Rp2.819.400,00

Rincian aset tetap peralatan dan mesin tersebut tercatat dalam KIB B (Peralatan dan Mesin).

Pelaksanaan Sensus KIB B Tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan. Berikut Monitoring Pelaksanaan Sensus KIB B di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan 31 Desember 2024:

Monitoring Pelaksanaan Sensus KIB B di Wilayah Kota Adm Jaksel sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

No.	Nama PD/UKPD	Monitoring KIB B
1	2	3
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	100%

Untuk capaian Sekretariat Kota sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **100%**.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp650.530.787.395,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.916.780.829,00 dari saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp647.614.006.566,00.

Kenaikan sebesar Rp2.916.780.829,00 terdiri dari:

Penambahan : Rp27.978.332.800,00

- Belanja Modal TA 2024 : Rp27.978.332.800,00

Pengurangan : Rp25.061.551.971,00

- Transfer Keluar ke SKPD Lain : Rp25.019.351.971,00

- Reklasifikasi Aset Tetap : Rp42.200.000,00

Rincian aset tetap gedung dan bangunan tercatat dalam KIB C (Gedung dan Bangunan).

Pelaksanaan Sensus KIB C telah selesai pada tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Sensus KIB C di Wilayah Kota Adm Jaksel.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp636.262.967,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*). Adapun rincian aset jalan, irigasi dan jaringan tercatat dalam KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan).

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp168.232.900,00 mengalami penurunan sebesar (Rp5.390.000,00) dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp173.622.900,00. Penurunan sebesar (Rp5.390.000,00) berupa Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2024.

Rincian aset tetap lainnya tercatat dalam KIB E (Aset Tetap Lainnya).

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Terdapat saldo Rp76.525.200,00 adalah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Ciganjur pada Konstruksi Dalam Pengerjaan di Neraca per 31 Desember 2024 (*Audited*) tidak

mengalami kenaikan/penurunan dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*).

Rincian kontruksi dalam pengerjaan tercatat dalam KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan).

7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp641.059.123.932,00) mengalami penurunan sebesar (Rp15.149.290.571,00) dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar (Rp625.909.833.361,00). Saldo tersebut terdiri dari :

- Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp45.944.239.001,00)
- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp594.688.252.445,00)
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar (Rp405.787.486,00)
- Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp20.845.000,00).

c) Aset Lainnya

Berikut rincian dari saldo aset lainnya Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota):

**Tabel 4. 9 Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Aset Rusak Berat	4.343.241.704,00	3.320.201.298,00	1.023.040.406,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(3.948.935.807,00)	(2.927.262.921,00)	(1.021.672.886,00)
3	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	349.855.283,00	349.855.283,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses	(349.855.283,00)	(349.855.283,00)	(0,00)

	Penyelesaian Mejlis Penetapan Status Aset			
Jumlah		394.305.897,00	392.938.377,00	1.367.520,00

Aset Lainnya pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp392.938.377,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.367.520,00 dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*). Aset Lainnya terdiri dari:

1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari Aset Rusak Berat dan Aset Dalam Proses Penyelesaian Mejlis Penetapan Status Aset. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp4.693.096.987,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.040.406 dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*).

a) Aset Rusak Berat

Untuk Aset Rusak Berat pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai saat ini masih dalam proses menunggu SK Penghapusan sehingga nilainya masih tercantum dalam Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*). Nilai Aset Rusak Berat dapat dilihat pada lampiran 3.

Aset Rusak Berat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp4.343.241.704,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.040.406,00 dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.320.201.298,00. Sedangkan untuk Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp3.948.935.807,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp1.021.672.886,00) dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar (Rp1.021.672.886,00).

b) Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai saat ini progres penyelesaian sudah sedang dan menunggu SK Penghapusan.

Nilai Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dapat dilihat pada lampiran 4. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp349.855.283,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp349.855.283,00. Sedangkan untuk Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar (Rp349.855.283,00) tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*).

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp4.298.791.090,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp1.021.672.886,00) dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*). Terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp3.948.935.807,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp1.021.672.886,00) dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) dan Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana disajikan

dalam Neraca sebesar (Rp349.855.283,00) tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*).

4.2.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Per 31 Desember 2024 (*Audited*) terdapat Kewajiban Jangka Pendek (utang) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) sebesar Rp20.713.866.036,00 berupa Utang Belanja dimana mengalami penurunan sebesar (Rp3.007.039.035,00) atau (12,68%) dari saldo 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp23.720.905.071,00. Rincian utang belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Rincian Utang Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Utang Belanja	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Utang Belanja Pegawai	19.500.810.064,00	22.878.280.751,00	(3.377.470.687,00)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.213.055.972,00	842.624.320,00	370.431.652,00
Jumlah		20.713.866.036,00	23.720.905.071,00	(3.007.039.035,00)

Daftar Rincian utang belanja diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai

Terdapat Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 (*Audited*) atau sebesar Rp19.500.810.064,00 mengalami penurunan sebesar (3.377.470.687,00) dibandingkan saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp22.878.280.751,00. **Nilai saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp19.500.810.064,00 antara lain berupa:**

1. Pembayaran TPP Beban Kerja sebanyak 403 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar Rp1.077.380.827,00

- (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000017SP2D/I/2025 tanggal 17 Januari 2025).
2. Pembayaran TPP Pegawai sebanyak 787 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar Rp17.790.556.437,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000267/SP2D/I/2025 tanggal 21 Januari 2025).
 3. Pembayaran TPP PPPK sebanyak 5 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar Rp24.202.800,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000268/SP2D/I/2025 tanggal 21 Januari 2025).
 4. Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bagi PLT sebanyak 44 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar Rp608.670.000,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000342/SP2D/I/2025 tanggal 23 Januari 2025).

Untuk saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp22.878.280.751,00. **Nilai saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp22.878.280.751,00 antara lain berupa:**

1. Pembayaran Kekurangan PPH Penyesuaian Pegawai Bulan Desember 2023 sebesar Rp273.881.018,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000002/SP2D/I/2024 tanggal 3 Januari 2024).
2. Pembayaran Tunjangan TPP Beban Kerja Bulan Desember 2023 sebesar Rp1.166.677.161,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000286/SP2D/I/2024 tanggal 19 Januari 2024).
3. Pembayaran Tunjangan TPP Pegawai Bulan Desember 2023 sebesar Rp20.981.307.085,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000383/SP2D/I/2024 tanggal 22 Januari 2024).
4. Pembayaran Kekurangan TPP a.n Yola Dwiyenti Bulan Agustus 2023 sebesar Rp7.930.278,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000009/SP2D/I/2024 tanggal 10 Januari 2024).

5. Pembayaran Tunjangan TPP Plt Bulan Desember 2023 sebesar Rp488.485.209,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D Nomor 4000595/SP2D/II/2024 tanggal 31 Januari 2024).

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Terdapat Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 (*Audited*) atau sebesar Rp1.213.055.972,00 mengalami kenaikan sebesar Rp370.431.652,00 dibandingkan saldo utang barang dan jasa per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp842.624.320,00. **Nilai saldo utang belanja barang dan jasa sebesar Rp1.213.055.972,00 antara lain berupa:**

Utang Belanja Jasa sebesar Rp1.213.055.972,00 terdiri dari:

- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari 2025 (Pemakaian Bulan Desember 2024) sebesar Rp1.199.657.823,00. Sudah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2025 sesuai dengan SP2D Nomor 4 000030/SP2D/II/2025 tanggal 20 Januari 2025.
- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari 2025 (Pemakaian Bulan Desember 2024) Kwarcab Pramuka Jakarta Selatan sebesar Rp913.524,00. Sudah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2025 sesuai dengan SP2D Nomor 4 000343/SP2D/II/2025 tanggal 23 Januari 2025.
- Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Januari 2025 (Pemakaian Bulan Desember 2024) sebesar Rp12.484.625,00. Sudah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2025 sesuai dengan SP2D Nomor 4 001211SP2D/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Untuk saldo utang barang dan jasa per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp842.624.320,00. **Nilai saldo utang belanja barang dan jasa sebesar Rp842.624.320,00 antara lain berupa:**

Utang Belanja Jasa sebesar Rp842.624.320,00 terdiri dari:

- Pembayaran Rekening Listrik Bulan Januari 2024 (Pemakaian Desember 2023) sebesar Rp830.083.378,00. Sudah dilakukan pembayaran pada

bulan Januari 2024 sesuai dengan SP2D Nomor 4 000287/SP2D/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.

- Pembayaran Jasa Telekomunikasi Tagihan Bulan Januari 2024. Sudah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2024 sebesar Rp12.540.942,00 2024 sesuai dengan SP2D Nomor 4 000288/SP2D/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota). Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp366.254.050.528,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.286.489.063,00) atau (0,89%) jika dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp369.540.539.591,00. Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp386.967.916.564,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.293.528.098,00) atau (1,60%) jika dibandingkan dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp393.261.444.662,00. **Rincian Ekuitas per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp366.254.050.528,00 sebagai berikut:**

Ekuitas	: (Rp66.882.025.850,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	: Rp433.136.076.378,00
RK PPKD Kas	: Rp459.058.705.414,00
Mutasi tambah	: Rp459.058.917.914,00
Realisasi Belanja per 31 Des 2024	: Rp459.058.917.914,00
Mutasi kurang	: Rp212.500,00
Koreksi Pengembalian Belanja	: Rp212.500,00
RK PPKD Non Kas	: (Rp25.922.629.036,00)
Mutasi tambah	: Rp2.382.052.935,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang	: Rp2.382.052.935,00
Ditransfer Keluar ke SKPD Lain	
Mutasi kurang	: Rp28.304.681.971,00
Transfer Keluar ke SKPD Lain	: Rp 28.304.681.971,00

Jumlah Ekuitas	: Rp366.254.050.528,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	: Rp386.967.916.564,00

4.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) hanya terdiri atas Beban yaitu Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan serta Beban Penyusutan dan Amortisasi. Berikut Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota):

**Tabel 4. 11 Laporan Operasional
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Perundangan-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI	417.869.549.049,00	380.527.410.459,00	37.342.138.590,00	9,81
Beban Pegawai	373.623.112.219,00	347.958.634.779,00	25.664.477.440,00	7,38
Beban Barang dan Jasa	44.246.436.830,00	32.568.775.680,00	11.677.661.150,00	35,86
Beban Barang	4.152.049.418,00	2.751.852.691,00	1.400.196.727,00	50,88
Beban Jasa	28.263.647.532,00	25.553.716.919,00	2.709.930.613,00	10,60

Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 (Audited) hal

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Pemeliharaan	11.830.739.880,00	4.263.206.070,00	7.567.533.810,00	177,51
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	18.553.016.392,00	13.441.471.738,00	5.111.544.654,00	38,03
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.345.016.020,00	1.078.517.307,00	1.266.498.713,00	117,43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.175.503.464,00	12.331.141.283,00	3.844.362.181,00	31,18
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.813.148,00	31.813.148,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	683.760,00	0,00	683.760,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	436.422.565.441,00	393.968.882.197,00	42.453.683.244,00	10,78
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	(436.422.565.441,00)	(393.968.882.196,00)	(42.453.683.244,00)	10,78
NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS NON OPERASIONAL- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(436.422.565.441,00)	(393.968.882.197,00)	(42.453.683.244,00)	10,78

Berikut penjelasan dari Uraian Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*):

a. Pendapatan-LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Tidak terdapat Pendapatan pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*).

b. Beban

Adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban-beban yang terdapat pada Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp436.422.565.441,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.453.683.244,00 atau 10,78% dari periode 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp393.968.882.197,00. Adapun Rincian Beban berdasarkan Rekap Beban per 31 Desember 2024 diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4. 12 Rincian Beban
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Beban	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Beban Operasi	417.869.549.049,00	380.527.410.459,00	37.342.138.590,00
	a. Beban Pegawai	373.623.112.219,00	347.958.634.779,00	25.664.477.440,00
	b. Beban Barang dan Jasa	44.246.436.830,00	32.568.775.680,00	11.677.661.150,00
	Beban Barang	4.152.049.418,00	2.751.852.691,00	1.400.196.727,00
	Beban Jasa	28.263.647.532,00	25.553.716.919,00	2.709.930.613,00
	Beban Pemeliharaan	11.830.739.880,00	4.263.206.070,00	7.567.533.810,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	18.553.016.392,00	13.441.471.738,00	5.111.544.654,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.345.016.020,00	1.078.517.307,00	1.266.498.713,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.175.503.464,00	12.331.141.283,00	3.844.362.181,00

No	Jenis Beban	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.813.148,00	31.813.148,00	0,00
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	683.760,00	0,00	683.760,00
	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
4	Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	436.422.565.441,00	393.968.882.197,00	42.453.683.244,00

Rincian Beban berdasarkan Rekap Beban per 31 Desember 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Beban Operasi pada Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp417.869.549.049,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.342.138.590,00 atau 9,81% dari periode 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp380.527.410.459,00. Rincian Beban Operasi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp373.623.112.219,00 mengalami kenaikan Rp25.664.477.440,00 dibandingkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp347.958.634.779,00. **Berikut rincian beban pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp373.623.112.219,00, terdiri atas:**

Belanja Pegawai - LRA	: Rp377.000.582.906,00
Belanja Pegawai Non BLUD - LRA	: Rp377.000.795.406,00
Koreksi Belanja Pegawai	: (Rp212.500,00)

Ditambah :

Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2024 : Rp19.500.810.064,00

Dikurangi :

Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2023 : Rp22.878.280.751,00

- b. Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp44.246.436.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.677.661.150,00 dibandingkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp32.568.775.680,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp44.246.436.830,00 adalah sebagai berikut:

- a) Beban Barang sebesar Rp4.152.049.418,00, terdiri atas:

Belanja Barang – LRA : Rp4.480.158.518,00

Belanja Barang Non BLUD – LRA : Rp4.480.158.518,00

Persediaan per 31 Des 2023 : Rp490.823.162,00

Ditambah :

Belanja Barang Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2023 : Rp72.651.728,00

Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke
Ekstrakomtabel : Rp2.819.400,00

Dikurangi :

Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset
Tetap/Lain-lain : Rp78.201.720,00

Belanja Barang Dibayar Dimuka
per 31 Des 2024 : Rp62.293.749,00

Persediaan per 31 Desember 2024 : Rp753.907.921,00

- b) Beban Jasa sebesar Rp28.263.647.532,00 terdiri atas:

Belanja Jasa – LRA : Rp27.893.215.880,00

Ditambah :

Utang Belanja Jasa per 31 Des 2024 : Rp1.213.055.972,00

Dikurangi :

Utang Belanja Jasa per 31 Des 2023 : Rp842.624.320,00

- c) Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.830.739.880,00 terdiri atas:

Belanja Pemeliharaan – LRA : Rp11.855.807.530,00

Ditambah :

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban
Pemeliharaan : Rp5.390.000,00

Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas
Diterima di Tahun Berikutnya : Rp30.457.650,00

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp18.553.016.392,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.111.544.654,00 dibandingkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.441.471.738,00. **Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp18.553.016.392,00, terdiri atas:**

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | : Rp2.345.016.020,00 |
| b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | : Rp16.175.503.464,00 |
| c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | : Rp31.813.148,00 |
| d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | : Rp0,00 |
| e. Beban Penyusutan Aset Lainnya | : Rp683.760,00 |
| f. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud | : Rp0,00 |

3. Beban Transfer

Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada periode 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) tidak memiliki beban transfer.

4. Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD

Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada periode 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) tidak memiliki beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD.

5. Beban Tak Terduga

Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada periode 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 2023 (*Audited*) tidak memiliki beban tak terduga.

6. Surplus/Defisit - LO

Pada Laporan Operasional Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah mengalami defisit operasional sebesar (Rp436.422.565.441,00) mengalami kenaikan sebesar Rp42.453.683.244,00

atau 10,78% dari periode 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar (Rp393.968.882.197,00).

Sehingga dapat disimpulkan Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) defisit senilai (Rp436.422.565.441,00) atau 10,78% dengan selisih sebesar (Rp42.453.683.244,00) dibandingkan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 (*Audited*) defisit senilai (Rp393.968.882.197,00)

4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Kota Administrasi Jakarta Selatan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota). Adapun rinciannya dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 13 Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas – LO</u>			
Ekuitas – LO per 31 Desember 2023 dan 2022	(16.894.176.301,00)	(117.220.030.249,00)	(100.325.853.948,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	386.434.715.892,00	495.066.023.532,00	(108.631.307.640,00)
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	0,00	0,00	0,00
Ekuitas – LO per 1 Januari 2024	369.540.539.591,00	377.845.993.283,00	(8.305.453.692,00)
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022	386.434.715.892,00	495.088.993.777,00	(108.654.277.885,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(386.434.715.892,00)	(495.066.023.532,00)	(108.631.307.640,00)
RK PPKD per 1 Januari 2024	0,00	22.970.245,00	(22.970.245,00)
JUMLAH EKUITAS AWAL	369.540.539.591,00	377.868.963.528,00	(8.328.423.937,00)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO	(436.422.565.441,00)	(393.968.882.197,00)	(42.453.683.244,00)
Mutasi RK PPKD	433.136.076.378,00	386.411.745.647,00	46.725.230.731,00
Koreksi Ekuitas	0,00	(771.287.387,00)	(771.287.387,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas	(3.286.489.063,00)	(8.328.423.937,00)	(5.041.934.874,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO	(66.882.025.850,00)	(16.894.176.301,00)	(49.987.849.549,00)
RK PPKD	433.136.076.378,00	386.434.715.892,00	46.701.360.486,00
EKUITAS AKHIR	366.254.050.528,00	369.540.539.591,00	(3.286.489.063,00)

Dari Tabel diatas untuk Laporan Perubahan Ekuitas terlihat bahwa jumlah Ekuitas Dana Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp366.254.050.528,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.286.489.063,00) dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp369.540.539.591,00. Rincian Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp366.254.050.528,00 sebagai berikut:

Jumlah Ekuitas Awal	: Rp369.540.539.591,00
Perubahan Ekuitas	
Surplus/Defisit LO	: (Rp436.422.565.441,00)
Mutasi RK PPKD	: Rp433.136.076.378,00
Koreksi Ekuitas	: Rp0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas	: (Rp3.286.489.063,00)
Ekuitas Akhir	
Ekuitas – LO	: (Rp66.882.025.850,00)
RK PPKD	: Rp433.136.076.378,00
Ekuitas Akhir	: Rp366.254.050.528,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Struktur Organisasi

Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Kota Administrasi adalah wilayah kerja Walikota yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Administrasi yang dipimpin oleh camat. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

Walikota adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Walikota dibantu oleh Wakil Walikota. Walikota dan Wakil Walikota merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi.

Struktur Organisasi Perangkat Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Lampiran XXXVIII Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas sebagai berikut :

1. Susunan organisasi struktural Kota Administrasi terdiri dari:
 - a. Walikota
 - b. Wakil Walikota
 - c. Sekretariat Kota

Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi. Sekretariat Kota dipimpin oleh Sekretaris Kota yang terdiri atas:

- 1) Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subkelompok Bina Pemerintahan; dan

- c. Subkelompok Tata Praja.
 - b) Bagian Hukum terdiri dari:
 - a. Subkelompok Pelayanan Hukum;
 - b. Subkelompok Bantuan Hukum; dan
 - c. Subkelompok Publikasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik terdiri dari:
 - a. Subkelompok Ketatalaksanaan;
 - b. Subkelompok Kepegawaian; dan
 - c. Subkelompok Pelayanan Publik.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
- a) Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian
 - b. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; dan
 - c. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Subkelompok Pekerjaan Umum;
 - b. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan; dan
 - c. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.
- 3) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
- a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Protokol.
 - b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Perbendaharaan; dan
 - c. Subkelompok Program dan Pelaporan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- a. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk; dan
- c. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.
- d. Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 2) Seksi Pemerintahan;
 - 3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 5) Kelurahan, terdiri atas:
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d) Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mencakup Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri dari jabatan struktural dan di bagian Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, serta jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan disajikan pada Gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan



Struktur Organisasi Perangkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas Sekretariat Kota Administrasi, 8 Bagian, beserta pejabat dengan uraian sebagai berikut:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan : M Anwar.
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan : Ali Murthadho, S.Sos., M.Si.
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan : Mukhlisin, S.Sos., M.A.
4. Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm Jaksel :
Tomy Fudihartono, S. Sos., M.Si.
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekko Kota Adm Jaksel : Sayid Ali Zainal A, S.H., M.Si.
6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Adm Jaksel :
Tomy Fudihartono, S. Sos., M.Si.
7. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan : Laila Saphira Murni, S.Sos.
8. Kepala Bagian Perekonomian : Drs. Mumu Mujtahid
9. Kepala Bagian Pemerintahan : Manaek Fernando S.Sos., M.Si.
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat : Drs. Khabib Asyngari
11. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Kepegawaian dan Pelayanan Publik : Eny Priyatni, S.Sos., MKM.
12. Kepala Bagian Hukum : Dedi Rohedi, S.H., M.H.
13. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Drs. Eko Kalbarianto
14. Kepala Bagian Umum dan Protokol : Poulinawati, S.Sos., M.Si.

5.2 Visi Dan Misi

Visi Kota Administrasi Jakarta Selatan :

“Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berbudaya, berorientasi pada pelayanan publik dan berwawasan lingkungan.”

Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan :

- a. Menjaga karakteristik budaya Betawi dan mengembangkan pusat perkampungan Betawi.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya.
- c. Meningkatkan dan mengendalikan pelayanan publik Kota Administrasi.
- d. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan pendidikan mental spiritual.
- f. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur.
- g. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, asset serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan aktual.
- i. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga.
- j. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
- k. Mempertahankan wilayah Jakarta Selatan sebagai resapan air.
- l. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian sarana dan prasarana serta utilitas kota.

5.3 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas sebagai berikut:

V.3.1 Kota Administrasi

- 1) Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

- 2) Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
 - e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
 - k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
 - l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
 - o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
 - p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;

- q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
 - r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
 - s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
 - t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
- 3) Kota Administrasi melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 - c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 - d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
 - h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan formulasi kebijakan strategis yang menjadi tolok ukur pencapaian pembangunan ke depan yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis yang holistik. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjawab isu strategis aktual. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari hasil (outcome) program perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional.

Tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 s/d 2026 dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran ini dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPDPProvinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran) tersebut ditetapkan sebagai kategori Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Insekda terlampir). Perubahan ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari KemenPAN RB yang merekomendasikan target kinerja harus mempertimbangkan Realisasi Kinerja tahun sebelumnya. Dimana Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) tahun 2023 lebih tinggi dari target tahun 2024 dalam Rencana Strategis (Renstra), sehingga perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis) dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 menjadi sebesar hasil Realisasi Kinerja Tahun 2023.

5.4.1 Tujuan Strategis

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.

5.4.2 Sasaran Strategis

Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal.

5.5 Target Kinerja Strategis

Target Kinerja Strategis pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Target Kinerja Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	$6=(4/5)*100$
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	95,61	89,5	107%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96,80	88,8	109%

	Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal				
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	94,42	88,5	107%

Sumber: Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026

5.6 Penghargaan yang Diterima

Penghargaan atau prestasi yang telah diterima Kota Administrasi Jakarta Selatan selama Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Inovasi berupa Pembuatan Sistem Informasi Proses Penerbitan Berita Acara Serah Terima (SIPERBAST) Penghargaan Program Komunitas Untuk Iklim Tingkat Nasional, Sertifikat (RW. 8 Kebagusan, Pasar minggu) dari Kementrian KLHK;
2. Inovasi : Penanganan Pengaduan langsung masyarakat melalui Sistem Pengaduan Koordinasi Sektoral (SIMAK);
3. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2024;
4. Kelurahan Gandaria Selatan Juara 1 Lomba Tari kreasi daerah nusantara tingkat Nasional kategori group TK;
5. Kelurahan Pondok Labu, Penghargaan Atas Komitmen dan Jasanya dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba Tahun 2024;
6. Penghargaan Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Tahun 2024;
7. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2024;
8. Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM;
9. Anugerah Panitia Seleksi Daerah Terbaik;
10. Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023;

11. Penghargaan Kategori Inovasi Masyarakat dalam acara Jakarta Innovation Award 2024;
12. Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024;
13. Penghargaan Kabupaten /Kota Kreatif 2024 Sub Sektor Seni Rupa;
14. Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Provinsi DKI Jakarta;
15. DTKJ Awards 2024 Dewan Transportasi Kota Jakarta;
16. Penghargaan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024;
17. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC):
18. Penghargaan Manggala Karya Kencana;
19. Penghargaan Penilaian Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) Kategori Digital;
20. Penghargaan Lomba Kreasi Menu Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) oleh Keluarga Resiko Stunting (KRS);
21. Penghargaan Duta Genre DKI Jakarta 2024 Kategori Putra;
22. Penghargaan Duta Genre DKI Jakarta 2024 Kategori Putri;
23. Penghargaan STQH ke XXVIII Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
24. Penghargaan Majelis Taklim Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
25. Juara Lomba Kampung Bebas Jentik Tingkat Provinsi;
26. Juara SBH tingkat Jakarta Selatan Juara 1 lomba cerdas cermat Juara 2 Lomba penyuluhan Juara 3 lomba reportase;
27. Lomba Tenaga Kesehatan Teladan (Dokter gigi) Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
28. Pengumpul ZIS terbanyak 1 Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
29. Kelurahan Srengseng Sawah Juara III Lomba Kinerja RPTRA (Gebyar RPTRA) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
30. RW 06 Kelurahan Srengseng Sawah Menjadi Juara 1 Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
31. Kelurahan Cipedak Juara Harapan 3 Lomba Kampung Tanpa Rokok Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
32. Juara 1 Kompetisi Badminton Piala Pj. Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 Dalam Rangka Pekan Olahraga Warga Jakarta Kompetisi Futsal dan Badminton;

33. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024;
34. Juara 2 Kompetisi Futsal Piala Pj. Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 Dalam Rangka Pekan Olahraga Warga Jakarta Kompetisi Futsal dan Badminton;
35. Camat Kecamatan Mampang Prapatan menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Badan publik Menuju Informatif Desember 2024;
36. Camat Mampang Prapatan menerima Sertifikat Penghargaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Juara 2 Instansi Penerapan Agent of Change Penyakit Tidak Menular (AoC PTM) Provinsi DKI Jakarta;
37. Kelurahan dengan Penataan Kawasan Terbaik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Kelurahan Ciganjur);
38. Juara 2 Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Kelurahan Cikoko);
39. Kelurahan Kebagusan mendapatkan Juara Proklim Tingkat Nasional;
40. Kelurahan Pasar Minggu mendapatkan penghargaan Penataan Kawasan Terbaik Tingkat Provinsi;
41. Kelurahan Pasar Minggu mendapatkan Peringkat 1 Gerakan Tertib Adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
42. Kelurahan Pejaten Barat mendapatkan penghargaan Juara 1 dalam lomba menyusun Lego Gebyar RPTRA Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan dan Provinsi DKI Jakarta;
43. Kelurahan Petukangan Utara mendapatkan penghargaan Penataan Kawasan Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
44. Kelurahan Petukangan Utara mendapatkan penghargaan Juara Harapan I Lomba Bedug Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
45. Kelurahan Pesanggrahan RW. 05 mendapatkan Peringkat II Gerakan Tertib Adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan entitas akuntansi sebagai bagian dari entitas Laporan LKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas laporan. Pada Laporan Keuangan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 31 Desember 2024 (*Audited*) ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) menyajikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp459.058.705.414,00 atau 97,11% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp472.733.405.986,00 dan mengalami kenaikan dari realisasi belanja 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp387.152.205.892,00.

2. Neraca

Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) pada periode 31 Desember 2024 (*Audited*) menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana. Pada periode 31 Desember 2024 (*Audited*) jumlah aset sebesar Rp386.967.916.564,00 atau turun sebesar (1,60%) dari periode sampai dengan 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp393.261.444.662,00, kewajiban mengalami penurunan sebesar

(Rp3.077.039.035,00) dari periode 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp23.720.905.071,00 menjadi Rp20.713.866.036,00, jumlah ekuitas sebesar Rp366.254.050.528,00 atau turun sebesar (0,89%) dari periode 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp369.540.539.591,00 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas menjadi Rp386.967.916.564,00 turun sebesar (1,60%) dibandingkan periode 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp393.261.444.662,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sehingga dapat disimpulkan Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) defisit senilai (Rp436.422.565.441,00) dikarenakan tidak ada pendapatan dibandingkan periode 31 Desember 2023 (*Audited*) defisit senilai (Rp393.968.882.197,00).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota). Dari Laporan Perubahan Ekuitas diatas terlihat bahwa jumlah Ekuitas Dana Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp366.254.050.528,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.286.489.063,00) dari periode 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp369.540.539.591,00.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sekretariat Kota) per 31 Desember 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada pada Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mana telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 21 Mei 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

M Anwar
NIP. 196605281998031003



LAMPIRAN

**Lampiran 1 Rincian Beban Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Beban Dibayar Dimuka		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	62.293.749,00	72.651.728,00	(10.357.979,00)
Jumlah		62.293.749,00	72.651.728,00	(10.357.979,00)

**Lampiran 2 Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Persediaan		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	753.907.921,00	490.823.162,00	263.084.759,00
Jumlah		753.907.921,00	490.823.162,00	263.084.759,00

**Lampiran 3 Rincian Aset Rusak Berat
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Aset Rusak Berat		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4.343.241.704,00	3.320.201.298,00	1.023.040.406,00
Jumlah		4.343.241.704,00	3.320.201.298,00	1.023.040.406,00

**Lampiran 4 Rincian Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	349.855.283,00	349.855.283,00	0,00
Jumlah		349.855.283,00	349.855.283,00	0,00